

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

NOVI MUSTIKAWATI

B200110207

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta)**

Novi Mustikawati (B200110207)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this research is to find empirical evidence of the effect of the influence of tax knowledge and modern administration system to the individual taxpayers compliance at KPP Pratama Surakarta.

The method used in this research is multiple linear regression method, to test the research data with SPSS 16.0 software. The unit of analysis in this study is an individual taxpayer entities in KPP Pratama Surakarta with a sample size 100 respondents.

The result of this study indicate that the tax knowledge and modern tax administration system significantly positive effect on tax compliance at the individual KPP Pratama Surakarta.

Keywords: tax knowledge, modern tax administration system, tax compliance

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda, untuk menguji data penelitian dengan *software* SPSS 16.0. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama Surakarta dengan jumlah 100 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta.

Kata kunci: *pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak.*

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :
**“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta)**

Yang ditulis oleh:

**NOVI MUSTIKAWATI
B 200 110 207**

Penandatangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2015

Pembimbing Utama



(Drs. M. Abdul Aris, M. Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E., M.Si.)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Menurut (Rahayu, 2009:129), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative dan compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak (Rahayu dan Lingga, 2009).

Dari tahun 2002, saat dilakukan perubahan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, hingga saat ini telah terjadi peningkatan penerimaan pajak secara nominal sebesar lebih dari 400%. Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio yang signifikan. Pada periode tersebut, tax ratio Indonesia hanya mampu bergerak di angka 12% (pajak pusat).

Asrul Hidayat, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) mengatakan dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 ditetapkan target tax ratio yang cukup ambisius yaitu sebesar 19% pada tahun 2019. Tentunya angka tersebut sangat mungkin untuk dicapai apabila dilakukan upaya yang luar biasa. Seperti dijelaskan sebelumnya, telah dilakukan perubahan struktur organisasi pada tahun 2002. Selain itu, pada tahun 2007 hingga 2009, tiga Undang-Undang disempurnakan yaitu UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Namun demikian, upaya luar biasa tersebut belum mampu menggenjot tax ratio ke angka di atas 15%.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang (Rahayu; 2010). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu; 2010).

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program good governance yang dilakukan secara terus-menerus.

Perbedaan penelitian ini dengan Lusiana Jayanti Sara (2013) dkk dapat dilihat dari dua elemen:

1. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, sedangkan objek penelitian Lusiana Jayanti Sara (2013) adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.
2. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sedangkan pada Lusiana Jayanti Sara menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga untuk penelitian kali ini peneliti mengambil judul “**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SURAKARTA)**”.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari bukti empiris pengaruh pemahaman pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mencari bukti empiris pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Perpajakan

1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) Pengetahuan pajak yaitu suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan. Wajib pajak akan secara sukarela mematuhi apabila mereka mengerti konsep dasar perpajakan.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mujiyati dan Abdul Aris (2011:6) pajak mempunyai empat macam fungsi, yaitu :

a. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Contoh dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan pertama untuk membiayai proyek-proyek terutama yang dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti pembangunan waduk-waduk, saluran irigasi, Puskesmas, SD inpres dan lain-lain sebagainya.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi harus berdasarkan Undang-Undang, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2003) dalam Patsal (2012:11) yaitu *Official Aassesment Syste, Self Assesment System, With Holding System*.

Menurut Mardiasmo (2011:3-4) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Teori Daya Pikul
- d. Teori Bakti
- e. Teori Asas Daya Beli

B. Pemahaman Tentang Sistem Administrasi Perpajakan Modern

1. Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Edy Suandy dalam Irawan dan Khairani (2013) sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur, yakni kebijakan perpajakan (*Tax Policy*), undang-undang pajak (*Tax Law*) dan administrasi perpajakan (*Tax Administration*).

2. Pengertian Administrasi

Menurut Ulbert Silalahi dalam Sinaga (2010:16) administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

3. Pengertian Administrasi Perpajakan

Pengertian administrasi perpajakan menurut Lumbantoruan (1997) dalam Candra.et al (2003) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai: (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga.

4. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pengertian sistem administrasi perpajakan modern menurut Sofyan (2005:53) adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001.

Menurut Liberti Pandiangan (2008:8) dalam Rapina, et al (2011) adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Sedangkan manfaat dari program modernisasi bagi wajib pajak sebagai berikut (www.reform.depkeu.go.id):

- a. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui:
 - 1) Konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN & BPHTB)
 - 2) Adanya tenaga *Account Representative (AR)* dengan tugas antara lain konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak (WP), mengingatkan Wajib Pajak (WP) atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, *update* atas peraturan perpajakan yang terbaru.
 - 3) Pemanfaatan IT secara maksimal: email, e-SPT, e-filling dan lain-lain.
 - 4) SDM yang profesional, adanya *fit and proper test dan competency mapping*, pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten, pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi).
 - 5) Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi.
- b. Penerapan dan penegakan *good governance* di semua lini.

5. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.131/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal dibawahnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini secara nasional.

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak menurut Liberty Pandiangan adalah:

- a. Maksimalisasi penerimaan pajak
- b. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak
- c. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi

- d. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak
- e. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional
- f. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan
- g. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
- h. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak

C. Pemahaman Penggunaan E-system

E-sytem perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. *E-System* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-NJOP* dan *e-NPWP*. *E-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

D. Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, Wajib Pajak patuh adalah mereka yang memenuhi kriteria dibawah ini, yaitu:

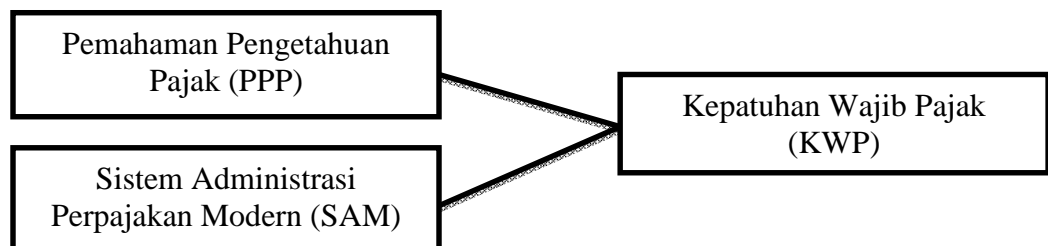
- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Sinaga (2011:35) faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
- b. Pelayanan pada wajib pajak
- c. Penegakan hukum pajak
- d. Pemeriksaan pajak
- e. Tarif pajak

E. Kerangka Penelitian

Kerangka Teoritis pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



F. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survei. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya hasil dipenelitian tersebut tidak sesuai dengan tujuan modernisasi, yakni meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2013). Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Dan hasil dari penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

G. Pengembangan Hipotesis

- a. Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Pajak (PPP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Supriyati & Nurhidayati (2008; Vol.7 No 1) menyatakan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang diperoleh langsung dari petugas pajak atau pun sosialisasi, maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

H₁ : Pengetahuan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Seperti masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai e-system dan cara penggunaannya, serta sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem online masih terjadi bertumpuknya data yang pada akhirnya sistem online tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam e-system menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2014) dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung Karees dapat dikatakan baik. Hal ini tercermin dari adanya kinerja yang baik dari indikator sistem administrasi, efektivitas pengawasan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional.

H₂: Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAM) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis.

B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sebanyak 100 orang yang dijadikan sebagai responden untuk dijadikan sampel dengan melanjutkan kepada hasil penelitian yang akan di uji. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *convenience sampling*. Untuk menghitung jumlah sampel minimum yang akan digunakan penelitian, menggunakan rumus *Slovin* (Riduwan, 2005:65), yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Jumlah populasi

e² = nilai/ batasan ketelitian yang diinginkan

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dan Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel indepen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemahaman dan pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan modern.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai dengan 5.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Normal	Setuju	Sangat Setuju

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda karena variabel independen terdiri dari dua variabel (pemahaman pengetahuan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern) dan variabel dependen terdiri dari satu variabel (kepatuhan wajib pajak). Menurut Ghozali (2011) untuk mendapatkan model regresi linier berganda yang baik harus memenuhi kriteria *BLUE*, yaitu *Best Linier Unbiased Estimator*. *BLUE* dapat dicapai jika memenuhi uji asumsi klasik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner sehingga pengujian yang akan dilakukan meliputi pengujian kualitas pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sampel

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberikan responden sebuah kuesioner yang merupakan sampel dari penelitian tersebut. Dari seluruh populasi di KPP Pratama Surakarta peneliti memperoleh sampel Wajib Pajak Pribadi sebesar 58 dan Wajib Pajak Badan sebesar 42 sebagai dalam penelitian ini.

Berdasarkan jumlah Wajib Pajak tersebut, kemudian perhitungan menggunakan rumus Slovin dan ditentukan jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak sebagai responden.

B. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum dari variabel Pemahaman Pengetahuan Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel IV.4
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pengetahuan Pajak	100	11.00	25.00	2116.00	21.1600	2.52150
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	100	14.00	25.00	2097.00	20.9700	2.32881
Kepatuhan Wajib Pajak	100	27.00	45.00	3818.00	38.1800	3.34054
Valid N (listwise)	100					

C. Uji Kualitas Pengumpulan Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Teknik korelasi yang digunakan adalah

analisis korelasi *Product Moment Pearson*. Data diolah dengan bantuan program *SPSS for Windows release 16.0*. Hasil uji validitas terhadap skor-skor item pernyataan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5
Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Interpretasi
1	0,508	0,256	Valid
2	0,631	0,256	Valid
3	0,539	0,256	Valid
4	0,562	0,256	Valid
5	0,521	0,256	Valid
6	0,796	0,256	Valid
7	0,791	0,256	Valid
8	0,822	0,256	Valid
9	0,610	0,256	Valid
10	0,668	0,256	Valid
11	0,618	0,256	Valid
12	0,692	0,256	Valid
13	0,668	0,256	Valid
14	0,654	0,256	Valid
15	0,591	0,256	Valid
16	0,694	0,256	Valid
17	0,706	0,256	Valid
18	0,594	0,256	Valid
19	0,726	0,256	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2014

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2011:47). Alat untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Adapun secara ringkas hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam tabel IV.6

Tabel IV.6
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Critical Value	Interpretasi
Pemahaman Pengetahuan Pajak	5	0,608	0,6	Reliabel
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	5	0,790	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	9	0,833	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

D. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji dua arah (*two tailed test*), yaitu dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,01. Jika *Sign* > 0,01 maka data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dan *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh sebagai berikut:

Tabel IV.7
Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Sign</i>	Keterangan	Keputusan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,654	0,786	Sign > 0,01	Normal

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

b. Uji Multikoleniaritas

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011:105).

Hasil uji ini dapat diketahui dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Model regresi dikatakan bebas dari multikoleniaritas apabila memiliki nilai VIF < 10, dan mempunyai angka *Tolerance value* > 0,10. Hasil pengujian multikoleniaritas diperoleh sebagai berikut:

Table IV.8
Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Tolerance	VIF	Interpretasi
Pemahaman Pengetahuan Pajak	0,978	1,023	Bebas Multikoleniaritas
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,978	1,023	Bebas Multikoleniaritas

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:139). Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *Absolut Residual* terhadap variabel Independen. Ada tidaknya heteroskedastisitas diketahui dengan melihat signifikasinya terhadap

kepercayaan 1%. Jika nilai signifikasi > 0,01 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas diperoleh sebagai berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig.	Interpretasi
Pemahaman Pengetahuan Pajak	-0,408	0,684	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,849	0,398	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

2. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan fungsional yang terjadi antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen, agar dapat diketahui nilai duga rata-rata variabel dependen atas pengaruh variabel independen dengan menggunakan skala interval. Estimasi model regresi linier berganda menggunakan program *SPSS 16 for Windows* adalah sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	PPP	SAM	Intercept	R ²	F	Adjusted R ²
KWP	0,465	0,694	13,747	0,430	36,587	0,418
Sig	0,000	0,000	0,000		0,000	

Sumber : Data Primer yang diolah 2014

Dari tabel di atas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 13,747 + 0,694 \text{ PMP} + 0,465 \text{ SAM} + \varepsilon$$

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98).

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan program *SPSS 16 for Windows* diperoleh hasil nilai dari F_{hitung} sebesar 36,587 dengan nilai *Sign* sebesar 0,000, diterima pada taraf signifikasi 1% sedangkan F_{tabel} dengan taraf signifikan 0,01, $df_1 = k-1$ atau $df_1 = 3-1$ dan $df_2 = n-k$ atau $df_2 = 100-3 = 97$ diperoleh nilai sebesar 4,83. Pada penelitian ini F_{hitung} 36,587 lebih besar dari F_{tabel} 4,83, sehingga H_0 gagal ditolak. Artinya ada pengaruh pemahaman pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011:98). Pengujian nilai t dilakukan dengan dua sisi yang digunakan untuk menguji hipotesis.

Hasil uji t menggunakan program *SPSS 16 for Windows* diperoleh sebagai berikut:

Tabel IV.11
Hasil Uji Hipotesis dengan Uji t

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Sign	Keterangan
Pemahaman Pengetahuan Pajak (PPP)	6,759	2,62747	0,000	H ₁ Diterima
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAM)	4,179	2,62747	0,000	H ₂ Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf sig 1% sehingga h_1 gagal ditolak yang artinya semakin meningkat tingkat pemahaman pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf sig 1% sehingga h_2 gagal ditolak yang artinya semakin meningkat pemahaman sistem administrasi perpajakan modern yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

A. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua variabel yaitu pemahaman pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, sehingga hasil penelitian tidak dapat dikenakan terhadap wajib pajak di daerah lain.
3. Penelitian ini hanya dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden, di mana responden bisa saja tidak jujur dalam responnya dan kemungkinan respon biasa dari responden.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah diambil oleh peneliti, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta
Perlu meningkatkan pelayanan yang optimal bagi Wajib Pajak, dan meningkatkan strategi yang baru dalam sosialisasi kepada Wajib Pajak agar dapat mengurangi keterlambatan dan tingkat kesalahan dalam pelaporan e-SPT secara berkelanjutan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Pada penelitian selanjutnya disarankan mengujikan variabel penelitian ini dengan menambah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang diteliti.
 - b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah pengukuran variabel dengan responden Wajib Pajak untuk melihat persepsi Wajib Pajak tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
 - c. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel independent yang lain agar dapat menyempurnakan dan membandingkan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. (2001). *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat. (2004).
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*, Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianwati. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1): h:126-142, Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Irawan, Hasan dan Siti Khairani. 2013. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*. Jurnal Akuntansi
- Jayanti, Sara Lusiana. 2014. *Pengaruh Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntasni
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

- Mujiyati dan Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: MUP.
- Patsal, Fitriana. 2012. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional Pada KPP Pratama Di Wilayah Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, edisi 1, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung*. *Jurnal Akuntansi*, 1(2): h:119-138.
- Rapina, Jerry dan Yenni Carolina. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*, *Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2 Oktober 2011*.
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung : Alfabeta.
- Sinaga, Ulum. 2011. *Pengaruh Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar . Skripsi*. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sri Rahayu. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2: 119-138.
- Supriyati dan Nurhidayati, 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 7(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.